



Salam Redaksi

Rentetan bencana ekologis di Sumatera menjadi peringatan keras bahwa kerusakan alam akibat eksploitasi berlebihan telah mencapai titik nadir yang menuntut pertanggungjawaban moral dan perbaikan kebijakan yang nyata.

Dalam edisi ini, Dr. Hermanto membedah fenomena tersebut melalui perspektif Platform PKS, yang memandang pelestarian lingkungan sebagai amanah transendental sekaligus wujud keadilan sosial melawan dominasi kepentingan segelintir kelompok.

Tulisan ini tidak hanya mengkritisi laju deforestasi dan kegagalan tata kelola, tetapi juga menawarkan langkah strategis pemulihan ekosistem demi mencegah "hukuman alam" yang lebih berat dan memastikan keselamatan generasi masa depan berbasis Platform PKS yang aplikatif.



PKS



MPP PKS

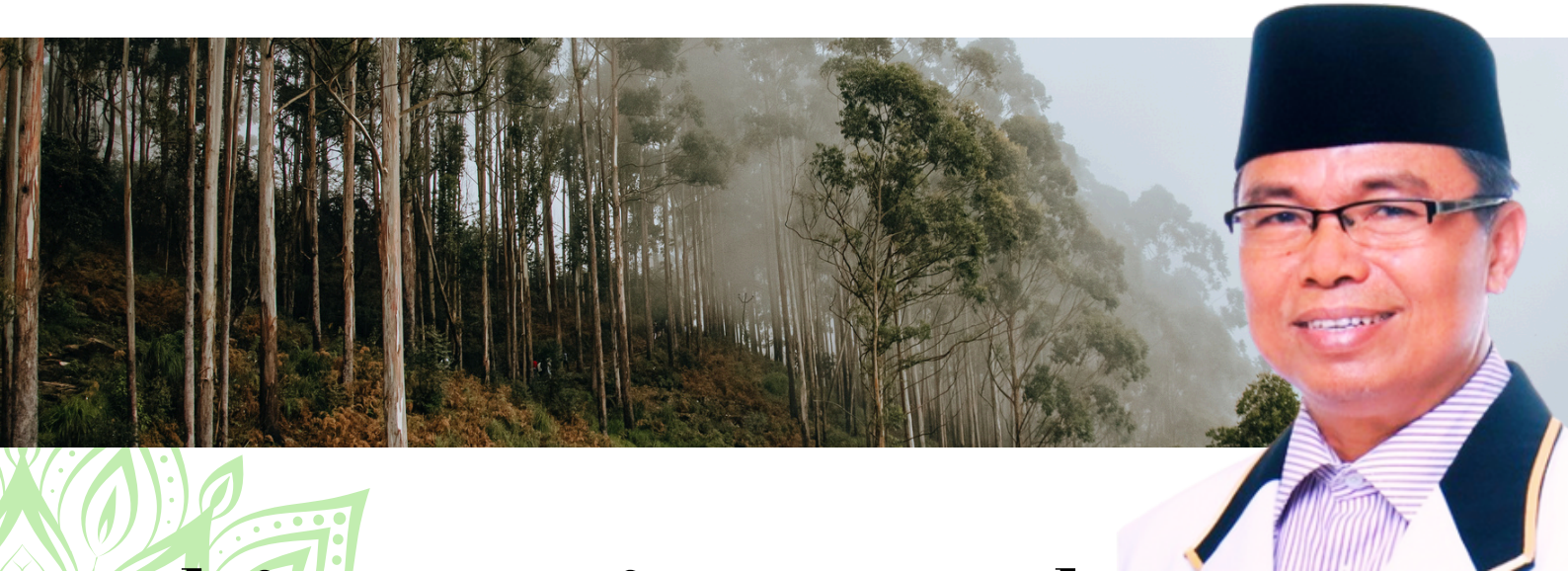
eBulletin IDEOLOGI

Diterbitkan oleh Majelis
Pertimbangan Pusat
(MPP)
Partai Keadilan Sejahtera

Media sosialisasi
Konsep Dasar Partai
(KDP) baik AD/ART,
Falsafah, Platform, GBKP,
Renstra PKS, dll.

Menjabarkan secara
jelas dan padat KDP
untuk pengokohan
IDEOLOGI Partai.

Karenanya penting
dibaca dan dihayati bagi
pimpinan dan kader PKS.
Juga untuk edukasi
masyarakat luas agar
lebih mengenal
perjuangan PKS.



Pelajaran Dari Bencana Alam Sumatera: Perspektif Platform PKS

Dr. Hermanto
Ketua Komisi SDM,
Organisasi dan
Kewilayahan MPP PKS.

Masalah lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius dalam Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia. Bagi PKS, pembangunan lingkungan hidup tidak dapat dipersempit hanya sebagai pembangunan fisik berupa gedung dan infrastruktur semata, melainkan harus dipahami secara lebih komprehensif sebagai pembangunan tata ruang dan ekosistem yang harmonis.

Pembangunan lingkungan hidup mencakup relasi yang saling menguatkan antara manusia, flora, dan fauna dalam satu kesatuan ekosistem yang utuh dan berkelanjutan. Hubungan ini bersifat

mutualis, bukan eksploitatif, dan harus dijaga agar kehidupan dapat berlangsung secara adil bagi generasi kini maupun generasi yang akan datang.

Dalam perspektif transendensi Islam, alam sejatinya adalah ciptaan Allah SWT yang ditundukkan untuk kemaslahatan manusia.

Namun penundukan alam tersebut tidak berarti manusia bebas mengeksploitasi tanpa batas. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan bahwa telah terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan manusia sendiri.

Karena itu, manusia memikul tanggung jawab moral dan spiritual untuk memelihara, merawat, dan menjaga keseimbangan alam.

Atas dasar pandangan tersebut, Platform PKS menegaskan bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dan harmonis dengan pembangunan lingkungan hidup. Pengelolaan tata ruang untuk kepentingan ekonomi, permukiman, serta pelestarian lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi, berimbang, dan berkeadilan.

Platform PKS juga menekankan bahwa pengelolaan hutan, tambang, dan sumber daya alam lainnya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok, baik kaum kapital, konglomerat, maupun oligarki. Ketimpangan penguasaan sumber daya alam adalah akar dari kerusakan ekologis dan ketidakadilan sosial.

Deforestasi yang tidak disertai langkah forestasi dan pemulihan kawasan hutan merupakan persoalan serius. Setiap tahun, ratusan ribu hingga jutaan hektare hutan menyusut akibat penebangan liar maupun penebangan berizin yang mengabaikan keseimbangan alam.

Data tahun 2024 menunjukkan bahwa luas kawasan hutan Indonesia tersisa sekitar 95,5 juta hektare, menurun drastis dari 120,4 juta hektare pada tahun 2023.



Penyusutan kawasan hutan tersebut sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia, baik untuk perkebunan sawit maupun pertambangan, yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Akibatnya, fungsi ekologis hutan sebagai penyerap, penyimpan, dan penyangga air hujan semakin melemah.

Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir 2025 merupakan pelajaran yang sangat mahal. Eksploitasi hutan dan tambang yang berlebihan—oleh masyarakat, korporasi, maupun akibat kelalaian kebijakan—telah menyebabkan rusaknya kawasan hutan, sehingga alam tidak lagi mampu menahan debit air hujan. Dampaknya adalah bencana ekologis yang meluluhlantakkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mencatat deforestasi sekitar 1,4 juta hektare di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang periode 2016–2025.

Bencana banjir dan longsor pada November–Desember 2025 tidak hanya menumbangkan pohon dan menghanyutkan kayu gelondongan legal maupun ilegal, tetapi juga memusnahkan tumbuhan endemik, mematikan satwa langka. Lebih parahnya bencana juga merusak lahan pertanian, menghancurkan infrastruktur, melenyapkan perkampungan, menyebabkan ribuan orang kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian, bahkan menelan korban jiwa dalam jumlah besar.

Ketika hukum dan kebijakan gagal mengendalikan kejahatan ekologis, alam akan menunjukkan hukumannya sendiri—tanpa pengadilan dan tanpa kompromi.

Tragisnya, mereka yang tidak bersalah sering kali ikut menanggung akibatnya.

Berangkat dari fakta kerusakan ekologis tersebut, serta pentingnya pembangunan yang seimbang, harmonis, dan berkeadilan, Platform PKS menegaskan perlunya langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meninjau ulang rencana tata ruang dan wilayah dengan menegakkan prinsip keseimbangan ekologis dan keadilan sosial, serta memperkuat peran hutan sosial dan kearifan lokal.
2. Memperketat pemberian izin pengelolaan hutan dan laut, termasuk pembatasan luasan konsesi agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.
3. Mencabut izin usaha dan menindak tegas pelaku eksploitasi hutan dan tambang yang melanggar undang-undang dan merusak ekosistem.
4. Membangun sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bersama masyarakat sekitar hutan dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.
5. Menindak oknum aparat yang menjadi pelindung kejahatan kehutanan dan pertambangan ilegal tanpa pandang bulu.
6. Memperkuat respons negara pada masa tanggap darurat dan pemulihan, guna menyelamatkan warga serta membangun kembali infrastruktur dasar yang rusak.

Langkah-langkah tersebut jadi bagian dari ikhtiar menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai amanah Allah SWT, sekaligus memastikan keberlanjutan kehidupan manusia, flora, dan fauna di bumi Indonesia.



BENCANA SUMATERA

Dalam Perspektif Platform PKS

Masalah lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang mendapat perhatian serius dalam Platform PKS dalam Pembangunan Indonesia.



Terkait Bencana Sumatera, Platform PKS menegaskan perlunya langkah-langkah strategis sebagai berikut:

Meninjau Ulang Tata Ruang

1. Meninjau ulang rencana tata ruang dan wilayah dengan menegakkan prinsip keseimbangan ekologis dan keadilan sosial, serta memperkuat peran hutan sosial dan kearifan lokal.

Sinergi Pengawasan

4. Membangun sinergi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah bersama masyarakat sekitar hutan dalam pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam.

Perketat Perizinan

2. Memperketat pemberian izin pengelolaan hutan dan laut, termasuk pembatasan luasan konsesi agar tidak melampaui daya dukung lingkungan.

Tindak Pelindung Perusakan

5. Menindak oknum aparat yang menjadi pelindung kejahatan kehutanan dan pertambangan ilegal tanpa pandang bulu.

Meninjau Ulang Tata Ruang

3. Mencabut izin usaha dan menindak tegas pelaku eksploitasi hutan dan tambang yang melanggar undang-undang dan merusak ekosistem.

Memperkuat Respon Negara

6. Memperkuat respons negara pada masa tanggap darurat dan pemulihan, guna menyelamatkan warga serta membangun kembali infrastruktur dasar yang rusak.

MPP PKS



dok.mpp



dok.mpp

PERKUAT PONDASI IDEOLOGI DAN ARAH PEMBANGUNAN BANGSA MPP PKS GELAR SOSIALISASI KONSEPSI DASAR BAGI PIMPINAN PUSAT DAN LEGISLATOR

JAKARTA (14/01/2026) – Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sukses menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk "Sosialisasi Konsepsi Dasar PKS". Acara yang berlangsung intensif selama dua hari, yakni Sabtu-Ahad, 10-11 Januari 2026 ini, dipusatkan di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS, Jakarta.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Presiden PKS, Dr. Almuzzammil Yusuf, serta diawali dengan sambutan arahan dari Ketua MPP PKS, Dr. Mulyanto. Forum ini menjadi wadah konsolidasi pemikiran strategis yang bertujuan menyamakan persepsi mengenai nilai-nilai dasar perjuangan partai di kalangan elit pimpinan dan wakil rakyat dari PKS.



dok.mpp



dok.mpp

Sebanyak 90 peserta hadir dalam sosialisasi ini, yang terdiri dari jajaran pimpinan strategis partai, meliputi Ketua Komisi MPP, Ketua Bidang Badan DPP PKS, Ketua Komisi Dewan Syariah Pusat (DSP), serta Anggota Fraksi PKS DPR RI. Kehadiran para legislator dan pimpinan struktur pusat ini menegaskan komitmen PKS untuk memastikan keselarasan antara ideologi partai dengan kerja-kerja politik dan legislasi di parlemen.

Tujuh Materi Strategis untuk Pembangunan Bangsa
Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pendalaman materi yang komprehensif melalui tujuh sesi utama yang menghadirkan narasumber ahli dari internal partai.

Tujuh Materi Strategis untuk Pembangunan Bangsa

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta mendapatkan pendalaman materi yang komprehensif melalui tujuh sesi utama yang menghadirkan narasumber ahli dari internal partai. Materi yang disampaikan mencakup landasan organisasi, visi pembangunan nasional, hingga penguatan ketahanan keluarga.

DENGAN TERSELENGGARANYA KEGIATAN INI, MPP PKS BERHARAP SELURUH ELEMEN PIMPINAN DAN LEGISLATOR PKS SEMAKIN SOLID DALAM MEMPERJUANGKAN ASPIRASI RAKYAT DAN MENGHADIRKAN SOLUSI KONKRET BAGI PEMBANGUNAN INDONESIA, BERLANDASKAN NILAI-NILAI LUHUR DAN KONSEPSI DASAR PARTAI.

Pada aspek fundamental organisasi, Dr. Suswono memaparkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKS, sementara Drs. Suharna Surapranata, MT. menjelaskan secara mendalam mengenai Falsafah Dasar dan Paradigma Perjuangan PKS.

Untuk memandu arah gerak politik partai ke depan, Dr. Hermanto menyampaikan materi mengenai Garis Besar Kebijakan Partai (GBKP) dan Rencana Strategis (Renstra) PKS.

Hal ini diperkuat dengan pemaparan Platform PKS untuk Pembangunan Indonesia yang dibagi ke dalam tiga sektor krusial:

- Bidang Politik dipaparkan oleh Dr. Diah Nurwitarsari.
- Bidang Ekonomi dikupas tuntas oleh Ir. Memed Sosiawan, ME..
- Bidang Sosial Budaya dijelaskan oleh Dr. Sapto Waluyo.

Selain isu pembangunan, forum ini juga menaruh perhatian besar pada aspek keamanan dan ketahanan sosial. Dr. Sapto Waluyo turut menyampaikan materi mengenai Wawasan Kewaspadaan dan Keamanan Partai Keadilan Sejahtera (Wanantara).

Menutup rangkaian materi strategis, Sri Rahayu Purwitaningsih menekankan pentingnya peran keluarga sebagai pilar peradaban melalui materi Signifikansi Pengarusutamaan Keluarga (PuK). Hal ini sejalan dengan visi PKS yang menempatkan keluarga sebagai basis utama dalam membangun masyarakat yang kokoh.



dok.mpp



dok.mpp



dok.mpp



dok.mpp



dok.mpp